

Analysis of Effectiveness, Efficiency, and Contribution of Regional Tax Revenue and Regional Levies to Original Regional Income (PAD) of Kerinci Regency Year 2019-2021

Nina Noviani^{1*}, Yudi², Muhammad Gowon³
Universitas Jambi

Corresponding Author: Nina Noviani ninanoviani9@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Regional Tax, Regional Levy

Received : 5 March

Revised : 15 March

Accepted: 25 April

©2024 Noviani, Yudi, Gowon: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The pupposes of this research is to determine the extent of the effectiveness, efficiency and contribution of regional taxes and levies to Kerinci Regency's Original Regional Income. This research was conducted at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) Kerinci Regency, Jambi Province. This research uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques, namely observation. The data used is secondary data in the form of reports on the realization of Kerinci Regency regional tax and levy revenues. The research results show that (1) The effectiveness of regional taxes and levies in Kerinci Regency is less effective (2) The efficiency of collecting regional taxes and levies is categorized as efficient (3) The contribution of regional taxes and levies is categorized as very less contributing. So it is hoped that the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Kerinci Regency can optimize regional taxes and levies in Kerinci Regency

Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2021

Nina Noviani^{1*}, Yudi², Muhammad Gowon³

Universitas Jambi

Corresponding Author: Nina Noviani ninanoviani9@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, pajak Daerah, Retribusi Daerah

Received : 5 March

Revised : 15 March

Accepted: 25 April

©2024 Noviani, Yudi, Gowon: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kerinci. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kerinci Kurang Efektif (2) Efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dikategorikan efisien (3) Kontribusi pajak dan retribusi daerah dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Sehingga diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci dapat mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kerinci

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan bentuk reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan perubahan sosial politik penyelenggaraan negara dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu seluruh potensi dan sumber daya yang ada harus terus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar pembangunan nasional dapat berlangsung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan di daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan untuk kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan masalah pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain-lain.

Kabupaten Kerinci, salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya. Untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, diharapkan Kabupaten Kerinci mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Kerinci. Dengan menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Kerinci, maka dapat meningkatkan pajak daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Efektivitas merupakan pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif (Schermerhorn 1989). Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Halim (2012) efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan tingkat target penerimaan pajak daerah dan retribusi. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana realisasi pajak dan retribusi daerah telah mencapai tujuan yang seharusnya dicapai dalam jangka waktu tertentu. Menurut Halim (2012), efisiensi adalah ukuran besarnya tarif pemungutan yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sangat penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi

pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengetahui apakah pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memoptimalkan otonomi daerah dan memaksimalkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah

Efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sambungan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODOLOGI

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variable yang digunakan yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, efektivitas pajak dan retribusi daerah, efesiensi pajak dan retribusi daerah, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Data target dan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun 2019-2021 yang dinyatakan dalam jumlah miliar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Data target dan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun 2019-2021 yang dinyatakan dalam jumlah miliar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Data biaya pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun 2019-2021 yang dinyatakan dalam miliar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Data biaya pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun 2019-2021 yang dinyatakan dalam miliar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun 2019-2021 yang dinyatakan dalam jumlah miliar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

Metode Analisis

Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total pendapatan asli daerah dari tahun ketahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya dari tahun yang datanya didapat dari BPKPD Kabupaten Kerinci. Sedangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kerinci dapat dihitung dengan cara:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah = $(\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Pajak daerah}) \times 100\%$
2. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah = $(\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Retribusi daerah}) \times 100\%$
3. Efesiensi Pemungutan Pajak Daerah = $(\text{Biaya pemungutan Pajak Daerah} / \text{realisasi penerimaan PAD}) \times 100\%$
4. Efesiensi Pemungutan Retribusi Dearah = $(\text{Biaya pemungutan Retribusi Daerah} / \text{realisasi penerimaan PAD}) \times 100\%$
5. Kontribusi Pajak Daerah = $(\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah} / \text{Realisasi penerimaan PAD}) \times 100\%$
6. Kontribusi Pajak Daerah = $(\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah atau Retribusi Daerah} / \text{Realisasi penerimaan PAD}) \times 100\%$

Kriteria Efektivitas

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

Tabel 1. Kriteria Penggolonga Efektifitas

Nilai efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Kriteria Efisiensi

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiesnsi pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

Tabel 2. Kriteria Penggolongan Efisiensi

Nilai efisiensi	Kriteria
>30%	Tidak efisien
21-30%	Kurang Efisien
11-20%	Cukup Efisien
5-10%	Efisien
<5%	Sangat efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Kriteria Kontribusi

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

Tabel 3. Kriteria Penggolongan Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kerinci

Potensi pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Kerinci ini dihitung berdasarkan kondisi data tahun 2019-2021. Kriteria nilai efektifitas keuangan daerah menurut Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektivitas
2019	15.395.000.000	13.850.000.000	90%	Efektif
2020	18.005.000.000	11.710.000.000	65,04%	Kurang Efektif
2021	16.130.000.000	13.130.000.000	81,4%	Cukup Efektif

Sumber: Olahan Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

Tabel 5. Tingkat efektifitas Retribusi Daerah

Tahun	Target Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektivitas
2019	4.393.728.000	2.820.000.000	64,1%	Kurang Efektif
2020	5.044.728.000	2.970.000.000	59,3%	Tidak Efektif
2021	5.596.728.000	2.980.000.000	53,2%	Tidak Efektif

Sumber: Olahan Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kerinci

Potensi pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Kerinci ini dihitung berdasarkan kondisi data tahun 2019-2021. Kriteria nilai efisiensi keuangan daerah menurut Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996, adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2019	-	13.850.000.000	-	-
2020	1.260.509.250	11.710.000.000	10,7 %	Efisien
2021	1.710.682.741	13.130.000.000	13 %	Cukup Efisien

Sumber: Olahan Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kerinci

Potensi pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Kerinci ini dihitung berdasarkan kondisi data tahun 2019-2021. Kriteria nilai Kontribusi keuangan daerah menurut Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2019	13.130.000.000	85.900.000.000	16,1%	Kurang Berkontribusi
2020	11.710.000.000	81.670.000.000	14,3 %	Kurang Berkontribusi
2021	13.850.000.000	66.360.000.000	19,8%	Kurang Berkontribusi

Sumber: Olahan Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kerinci

Tabel 8. Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2019	2.820.000.000	85.900.000.000	3,2%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	2.970.000.000	81.670.000.000	3,6 %	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	2.980.000.000	66.360.000.000	4.5 %	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber: Olahan Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kerinci

PEMBAHASAN

Pajak daerah di Kabupaten Kerinci terbagi atas 9 jenis pungutan pajak, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai pajak yang diperoleh sejak tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Efektivitas pajak daerah tahun 2019-2021 yaitu 90 %, 65 %, dan 81,4 % sehingga dapat disimpulkan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kerinci kurang efektif karena rata-rata rasio efektivitasnya berada pada rasio 78,9 %.

Dari segi target penerimaan pajak di Kabupaten Kerinci sejak tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan dari segi realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Target Penerimaan pajak daerah tahun 2019-2021 yaitu: Rp.15.395.000.000, Rp.18.005.000.000, dan Rp. 16.130.000.000. Dari segi realisasi penerimaan pajak yaitu sejak tahun 2019-2021 dengan nilai Rp.13.850.000.000, Rp.11.710.000.000, dan Rp.13.130.000.000. Sedangkan retribusi pajak juga mengalami kenaikan, walaupun data pada tahun 2019 tidak tersedia namun dari tahun ketahun berikutnya penerimaan retribusi meningkat lebih dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 dengan persentase 10,7 % dan 13 %.

Hasil analisis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci sejak tahun 2019-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.8 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan 4.9 Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah yaitu senilai Rp.85.900.000.000, Rp.81.670.000.000, Rp. 66.360.000.000. Dilihat dari hasil analisis kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2019-2021 yaitu: 16,1 %, 14,3 %, 19,8 %. Jika dilihat dari segi rasio kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan peningkatan, jika dihitung menurut kriteria tingkat kontribusi pajak daerah Kabupaten Kerinci terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dari segi rasio kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 3,2 %, 3,6%, dan 4,5%. Dari data tersebut dapat dikatakan Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan meskipun berada dikategori Sangat Tidak Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata efektifitas pajak daerah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 78%. Sehingga dapat dikategorikan Tidak Efektif.
2. Rata-rata efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Kerinci dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 58,8%, sehingga dapat dikategorikan Tidak Efektif.
3. Efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir yakni 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata memiliki rasio efisiensi pajak dan retribusi daerah dengan kriteria Efisien. Rasio efisiensi terendah terdapat pada tahun 2020 yakni sebesar 10,7%.
4. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 secara garis besar tergolong Kurang Berkontribusi. Dari tahun 2019-2021, rata-ratanya hanya mencapai 16,7%. Adapun rasio kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2021 dengan persentase 19,8% (Kurang Berkontribusi).

Rekomendasi

- a) Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variable lain yang lebih relevan terkait Pendapatan Asli Daerah.
- b) Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatory dengan tujuan penelitian yang lebih banyak.
- c) Agar Peneliti selanjutnya dapat mengolah dan menggunakan metode kualitatif agar penelitian lebih bervariasi

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan Penelitian

1. Data yang dimiliki oleh dinas dan instansi yang terkait untuk data penelitian ini masih kurang lengkap.
2. Data yang diberikan memerlukan waktu yang sangat lama dan diberikan bertahap sehingga penelitian tertunda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Terimakasih kepada Pak Yudi dan Bapak Muhammad Gowon selaku pembimbing saya yang telah membimbing, memberi arahan dan saran yang bermanfaat serta keluarga saya yang telah memberikan dukungan yang banyak dan doa yang berlimpah. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

_____.No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

_____.No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah

Halim, Abdul. 2012. 4 Salemba *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Penerbit Salemba. [https://leksikabookstore.com/product-detail/Akuntansi Keuangan Daerah](https://leksikabookstore.com/product-detail/Akuntansi%20Keuangan%20Daerah).

Kepmendagri, Nomor 6990.900.327.1996. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.

Resmi S, 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian. Alfabeta Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.